MOTIF RUMAH TANGGA MISKIN DALAM PENERIMAAN PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS)

Ratna Dewi Palupi
Program Studi S1-Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
ratnapalupi@mhs.unesa.ac.id

Sugeng Harianto
Program Studi S1-Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
sugengharianto@unesa.ac.id

Abstrak

Memiliki rumah layak huni merupakan kebutuhan primer tetapi tidak semua manusia berkesempatan memilikinya. Pemerintah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bermaksud membantu masyarakat untuk memiliki rumah layak huni dan dalam pelaksanaannya, bantuan ini tidak lepas dari berbagai opini dari masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam perspektif teori fenomenologi Alfred Schutz yang bertujuan untuk menganalisis "motif sebab (*because of motive*)" dan "motif tujuan (*in order to motive*)" rumah tangga miskin dalam penerimaan BSPS. Penelitian yang dilakukan di Desa Cangakan, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur ini menemukan bahwa motif rumah tangga miskin dalam penerimaan BSPS adalah: kondisi ekonomi tidak mampu, memiliki keahlian menukang, memiliki rumah layak huni, memiliki tempat berdagang, terhindar dari banjir, terhindar dari kebakaran, dan juga berharap ada bantuan lain yang lebih sesuai.

Kata Kunci: Kemiskinan, Rumah Tangga Miskin, Motif Sebab, Motif Tujuan

Abstract

Having a proper house to live in is a primary need but not everyone has the opportunity to have it. The goverment through the Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) program has a goal to help people have a proper house to live in and its implementation, this program cannot be separated from various public opinions.This research use qualitative approach in the perspective of Alfred Schutz in phenomenology theory that aims to anlyze "because of motive" and "in order to motive" of poor households in receiving BSPS. Research conducted in Cangakan Village, Kasreman Sub-district, Ngawi Regency, East Java, found that the motives of poor households in receiving BSPS are: poverty conditions, expert in construction, having place to trade, avoid from flood and fire and also hope for other more suitable assistance.

Keywords: Poverty, Poor Households, Because of Motive, In Order to Motive

PENDAHULUAN

Euforia keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tidak serta merta menjadikan kemiskinan di Indonesia menjadi sebuah persoalan yang selesai untuk dibahas. Justru, fenomena kemiskinan yang *real* ada di lapangan menjadi tema yang sangat menarik untuk dikaji karena begitu kontras dengan berita yang menyatakan bahwa angka

kemiskinan di Indonesia turun hingga 40% dalam dua dekOPade terakhir (Fajriah, 2018). Mengutip Rahardjo Adisasmita dalam bukunya Membangun Desa Partisipatif, ada lebih dari 65 persen dari total penduduk Indonesia tinggal di daerah perdesaan yang erat kaitannya dengan sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama. Hal ini membuat sektor pertanian bisa diartikan menjadi lebih luas yakni meliputi sub-sub sektor tanaman pangan, peternakan, perkebunan, kehutanan, dan juga perikanan. Lingkup wilayahnya yang luas memungkinkan perdesaan memiliki jumlah penduduk yang tersebar, dan memiliki tingkat pendidikan, pendapatan, serta derajat kesehatan yang beragam. Belum lagi akses terhadap bahan – bahan produksi, modal, investasi, dan informasi, yang cenderung lebih rendah dibandingkan wilayah perkotaan (Adisasmita, 2006: 1).

Persentase jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2017 adalah sebesar 10,64 persen atau sekitar 27,77 juta jiwa. Data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia dari tahun 1999 - 2017 menunjukkan tren menurun. Data tersebut memuat informasi bahwa jumlah penduduk miskin di desa lebih besar dari jumlah penduduk miskin di kota. Hal ini juga menunjukkan bahwa persebaran penduduk miskin di desa juga lebih besar dari pada jumlah penduduk miskin di kota. Dalam periode tersebut, terlihat tren penurunan angka kemiskinan di perkotaan relatif lebih cepat dibandingkan dengan angka kemiskinan di pedesaan. Artinya, ini adalah persoalan aksesibilitas yang mana ada kesenjangan aksesibilitas antara di desa dan di kota, dimana aksesibilitas di desa lebih kecil daripada di kota. Konsekuensinya terhadap pembangunan adalah bahwa sampai kapanpun pembangunan tidak akan bisa merata jika aksesibilitasnya juga tidak merata. Kesempatan warga negara yang tinggal di kota untuk menikmati akses akan jauh lebih cepat dan jauh lebih banyak karena memang aksesnya banyak, sedangkan di desa aksesnya terbatas padahal penduduknya banyak. Itu berarti kesempatan penduduk desa untuk menikmati akses itu juga semakin kecil.

Kemiskinan merupakah sebuah permasalahan yang sangat kompleks. Pemerintah Indonesia memberikan perhatian besar terkait masalah ini karena bersinggungan langsung dengan alenia ke-4 pembukaan UUD 1945 yakni tentang cita – cita pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Kemiskinan merujuk pada situasi serba terbatas yang terjadi bukan karena kehendak yang bersangkutan. Kemiskinan merupakan bentuk dari ketidakterpenuhannya aspek primer dan sekunder seseorang (Kadji, 2013: 107). Salah satu dari tiga kebutuhan primer manusia yang harus dipenuhi adalah rumah. Pemenuhannya yang “bisa ditangguhkan”, menyebabkan kebutuhan akan rumah hanya menempati urutan ketiga setelah kebutuhan akan makanan dan pakaian.

Budiharjo (2009, dalam Kadji 2013: 108) mengungkapkan bahwa salah satu permasalahan

UNESA Universitas Negeri Surabaya

di bidang perumahan dan pemukiman di Indonesia adalah rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni dan terjangkau bagi masyarakat miskin. Dari permasalahan ini, dibutuhkan peran dari pemerintah untuk menyediakan subsidi sebagai konsekuensi jika negara mengakui bahwa rumah termasuk dalam kebutuhan primer (Santoso 2002, dalam Kadji, 2013: 108).

Pemerintah melalui Kementerian Perumahan Rakyat menggulirkan bantuan yang diberi nama Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program ini merupakan salah satu program yang bertujuan untuk membantu masyarakat miskin untuk dapat membangun rumah layak huni. Selain itu, berdasarkan pasal 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman, program BSPS diselenggarakan untuk mendukung penataan, pengembangan wilayah, serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan pemukiman. Selain itu, dana bantuan ini juga bertujuan untuk menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya.

Salah satu daerah yang baru – baru ini mendapatkan progam bantuan ini adalah Kabupaten Ngawi. Kabupaten Ngawi merupakan sebuah kabupaten paling Barat Provinsi Jawa Timur sekaligus satu – satunya akses darat untuk masuk ke Provinsi Jawa Tengah dan daerah Jawa bagian Barat.

Letaknya yang strategis —sebagai jalur utama perdagangan dan transportasi— tidak serta merta menjadikan kabupaten ini masuk dalam jajaran kabupaten terkaya di Provinsi Jawa Timur. Ironisnya, kabupaten ini memiliki persentase penduduk miskin sebesar 14,91%. Jika dibandingkan dengan kabupaten–kabupaten di sekitarnya, Kabupaten Ngawi memiliki persentase kemiskinan yang lebih tinggi. Kabupaten Magetan misalnya, sebagai kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Ngawi, memiliki persentase kemiskinan sebesar 10,48%. Lalu disusul oleh Kabupaten Nganjuk dengan 11,98 dan Kabupaten Madiun dengan 12,28% (Badan Pusat Statistik, 2017: 16).

Dana sebesar 5,6 milyar rupiah, digelontorkan untuk mensuskeskan program ini. Berdasarkan SK PPK BSPS Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Ngawi mendapatkan bantuan bagi peningkatan Rumah Tidak Layak Huni sejumlah 374 unit yang tersebar pada 5 desa yakni Desa Jatirejo (78 unit), Desa Cangakan (121 unit), Desa Karangmalang (77 unit), Desa Kasreman (30 unit), dan Desa kiyonten (68 unit) (Direktorat Jenderal Penyedia Perumahan: 2017).

Desa yang mendapatkan program BSPS terbanyak adalah Desa Cangakan. Desa Cangakan termasuk dalam wilayah administasi Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi. Ada 121 rumah tangga miskin di desa ini yang mendapatkan progam BSPS. Hal ini sejalan dengan situasi di lapangan yang mana di desa

UNESA Universitas Negeri Surabaya

ini masih ditemukan rumah – rumah warga yang terbuat dari papan kayu, triplek, dan juga anyaman bambu. Selian itu, masih juga ditemukan rumah – rumah warga yang beralaskan tanah. Untuk itu, bantuan ini diberikan dalam bentuk material bangunan senilai 15 juta rupiah per rumah yang disalurkan dalam 2 tahap. Penerima bantuan tidak diwajibkan membangun keseluruhan rumah mereka karena keterbatasan bantuan material yang ada. Jika ditotal, keseluruhan material ini bisa digunakan untuk membangun rumah berukuran kurang lebih 5 x 5 meter persegi.

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan tema penelitian ini. Asta Lugra Pramita dkk. mengkaji tentang peranan dana bantuan sosial terhadap kualitas rumah masyarakat miskin melalui program bedah rumah. Dari penelitian ini, diketahui bahwa masyarakat sangat terbantu dengan ada bantuan yang diberikan, namun semuanya tak luput dari kendala, mulai dari sosialisasi hingga penjajagan. (Pramita, 2015).

Amado, Miguel P. dkk, dalam jurnal internasional yang berjudul *Inclusive housing program:The case of Oé-Cusseregion in East Timor* yang menyoroti ketidakmerataan pembangunan antara perkotaan dan pedesaan menyebabkan migrasi yang mengarah ke pusat perkotaan sekali. Jurnal ini membahas pengembangan program perumahan inklusif, yang mana didasarkan pada gagasan bahwa rumah adalah penggerak pembangunan pedesaan. Hasil utamanya, progam ini memberikan solusi bagi perumahan bahwa upaya keuangan dalam hal pembangunan bisa diusahakan melalui skema partisipatif (Amado, 2017).

Isabella, dkk. (2017) mengkaji tentang evaluasi program bantuan stimulan perumahan swadaya yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan program bantuan stimulan terdapat permasalahan yakni adanya persyaratan yang membebani dari penerima bantuan dengan memiliki dana swadaya untuk membayar upah pekerja muapun perijinannya. Selain hal itu adanya keterlamabatan turunnya dana bantuan juga sebagai salah satu faktor permasalahan yang ada.

Program BSPS yang diluncurkan merupakan program bantuan yang bersifat stimulan, sehingga penerima bantuan diperbolehkan untuk menambah secara pribadi material sudah diberikan sehingga bisa mendapatkan hunian dengan kualitas yang lebih baik. Kendati demikian, belum semua rumah tangga miskin di Desa Cangakan berkesempatan untuk mendapatkan bantuan BSPS. Di lapangan masih ditemui rumah tangga miskin yang belum menerima bantuan BSPS, serta juga ditemukan rumah tangga miskin yang belum siap untuk menerima program ini, sehingga untuk sementara waktu memilih untuk tidak mengambil bagian dalam program BSPS tahun 2017. Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis motif – motif warga penerima BSPS serta strategi yang mereka gunakan dalam upayanya mensukseskan program bantuan ini.

UNESA Universitas Negeri Surabaya

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif teori fenomenologi Alfred Schutz. Fenomenologi Schutz ditandai oleh adanya dua motif tindakan yang mempengaruhi tidakan manusia, yakni *because of motive* yang secara sederhana diatikan sebagai motif yang mendasari suatu tindakan (motif sebab), dan *in order to motive* yang mengacu pada tujuan seseorang dalam melakukan suatu tidakan (Poloma, 2000: 260). Penelitian kualitatif dilakukan untuk memahami fenomena sosial dari pandangan pelakunya. Dalam perspektif fenomenologi, kemiskinan tidak dilihat secara objektif (misalnya melalui pengukuran), tetapi kemiskinan merupakan sebuah realitas sosial yang dialami rumah tangga miskin, sehingga mereka sendirilah pihak yang paling tepat untuk mendeskripsikan kemiskinan yang dialaminya. Penelitian ini berusaha mengkaji, menguraikan, dan mendeskripsikan data mengenai motif rumah tangga miskin dalam penerimaan program BSPS.

Yang menjadi subjek penelitian adalah 6 rumah tangga miskin penerima BSPS serta 1 rumah tangga miskin yang mengundurkan diri dari program BSPS. Subjek penelitian dipilih dengan menggunakan teknik *purposive* dengan pertimbangan mereka menjadi penerima program BSPS (Moleong, 2011:224) .

Peneliti menggunakan observasi dan wawancara mendalam dalam mengumpulkan data primer. Observasi ini dimulai dengan mendatangi kantor desa guna memperoleh gambaran umum tentang desa, monografi desa, serta informasi terkait program BSPS dan penerimanya yang nantinya akan menjadi subjek dalam penelitian ini. Selanjutnya, observasi dilakukan dengan mengelilingi desa untuk mendapatkan gambaran nyata keadaan desa, kondisi sosial ekonomi, serta untuk melihat aktivitas umum yang dilakukan masyarakat desa.Selanjutnya, berdasarkan data yang diperoleh dari kantor desa, peneliti lalu menentukan warga yang akan menjadi subjek penelitian ini. Setelah subjek penelitian di dapatkan, peneliti lantas mengunjungi rumah subjek untuk kemudian melakukan wawancara mendalam.

Wawancara mendalam dimulai dengan melakukan wawancara dengan aparat desa yakni Kepala Dusun Pencol, dan Kepala Urusan Pembanguan Desa Cangakan. Wawancara dilakukan dengan mendatangi kediaman Kepala Dusun Pencol dan Kepala Urusan Pembangunan Desa Cangakan lalu melakukan wawancara seputar desa dengan alat bantu rekaman suara dari gawai peneliti dan juga kertas untuk mencatat poin-poin penting. Melalui keduanya, peneliti mendapatkan informasi seputar desa, salinan data monografi desa, kegiatan desa, lalu informasi singkat mengenai program BSPS, dan sekaligus salinan data warga penerima BSPS beserta jumlah dan bentuk bantuan yang diterima masing-masing warga. Tahap selanjutnya adalah dengan mendatangi 6 warga penerima BSPS dan 1 warga yang

UNESA Universitas Negeri Surabaya

mengundurkan diri dari program BSPS untuk kemudian dilakukan wawancara terkait perspektif mereka tentang program BSPS. Wawancara ini dilakukan dengan melakukan wawancara yang direkam (suara) dan ditulis. Seluruh wawancara yang dilakukan mengacu pada pedoman wawancara yang berisi pertanyaan terbuka sehingga subjek bisa menjawab dengan lebih luwes, dan mendalam.

Peneliti menggunakan teknik analisis data interaktif, artinya analisis data bisa dilakukan terus menerus sepanjang penelitian ini dilakukan. Menurut Milles dan Huberman (Emzir, 2012: 129-135), model analisis data ini dilakukan dengan langkah-langkah: (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi. Validitas data dalam penelitian ini diukur dengan triangulasi sumber data dan triangulasi metode untuk kemudian dilakukan penarikan kesimpulan yang tidak bersifat generalisir dan hanya dimaksudkan untuk memberikan gambaran pada subjek di wilayah yang menjadi fokus penelitian ini.

KAJIAN PUSTAKA

A. Kriteria Kemiskinan

Di Indonesia, jamak ditemui studi tentang kemiskinan yang dilakukan oleh berbagai elemen mulai dari pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi, maupun pihak lain yang bekerjasama dengan pihak tertentu. Badan Pusat Statistik (BPS) mendefiniskan kemiskinan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kehidupan dasarnya untuk hidup layak. Umumnya, metode pengukuran yang digunakan dalam metode penelitianya adalah metode kuantitatif (objektif), misalnya terkait mengukur kemiskinan dari jumlah konsumsi beras, tingkat pengeluaran individu tiap tahunnya, kebutuhan gizi per hari, pendapatan perkapita, konsumsi kalori, bahkan indeks mutu hidup (Siahaan, 2011: 221).

Selain metode-metode pengukuran tersebut, BPS Indonesia menggunakan empat belas indikator untuk mengukur kemiskinan di Indonesia, baik kemiskinan yang terjadi di pedesaan maupun di perkotaan. Keempat belas indikator tersebut adalah (1) luas lantai rumah; (2) jenis lantai rumah; (3) jenis dinding rumah; (4) fasilitas tempat buang air besar; (5) sumber air minum; (6) penerangan yang digunakan; (7) bahan bahan bakar yang digunakan; (8) frekuensi makan dalam sehari; (9) kebiasaan membeli daging/ayam/susu; (10) kemampuan membeli pakaian; (11) kemampuan berobat ke puskesmas/poliklinik; (12) lapangan pekerjaan kepala rumah tangga; (13) pendidikan kepala rumah tangga; dan (14) kepemilikan aset.

Keempat belas indikator tersebut masih dianggap belum mampu mengidentifikasi dimensi kemiskinan yang sedang dialami rumah tangga miskin tersebut. Realitas di Indonesia sejak tahun 1980-an hingga saat ini, memperlihatkan bahwa kemiskinan yang terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan, mayoritas merupakan kemiskinan yang berdimensi struktural. Hal ini pernah dikemukakan oleh

UNESA Universitas Negeri Surabaya

Selo Soemardjan (dalam Alfian 1980), bahwa kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena stuktur sosial masyarakat itu tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka.

Dalam pandangannya, Soemardjan menyebut bahwa kemiskinan struktural terjadi pada (1) petani yang tidak memiliki tanah/ petani berlahan sempit, dan (2) buruh, pengusaha kecil tanpa fasilitas dari pemerintah yang kerap digolongkan sebagai pendududk dengan ekonomi sangat lemah.

B. Bentuk Kemiskinan

Menurut Baswir, (1997: 23 dalam Takdir, 2013), Sumodiningrat, (1998: 90 dalam takdir, 2013) secara sosio-ekonomis dijelaskan ada dua bentuk kemiskinan, yakni kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut mengacu pada kemiskinan yang dialami oleh orang yang tingkat pendapatannya di bawah garis kemiskinan sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan primer, sedangkan kemiskinan relatif dilihat dengan membandingkan tingkat pendapatan. Hal ini bisa dilihat jika seseorang termasuk golongan orang kaya di suatu daerah, maka belum tentu orang tersebut tergolong kaya jika diukur dari daerah lain.

Sudut pandang lain ditawarkan oleh Kartasasmita yang melihat bahwa ada 3 bentuk kemiskinan jika ditinjau darin faktor penyebabnya, yakni (1) kemiskinan natural, (2) kemiskinan kultural, dan (3) kemiskinan struktural (Kartasasmita, 1996: 235, Sumodiningrat, 1998: 67, dan Baswir, 1997: 23 dalam Takdir, 2013).

Kemiskinan natural dialamatkan pada keadaan miskin yang sejak awalnya memang demikian, sehingga masyarakatnya tidak memiliki sumber daya yang memadai (baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia). Hal ini membuat pendapatan mereka menjadi rendah. Menurut Baswir (1997: 21 dalam takdir, 2013) kemiskinan natural ini disebabkan oleh faktor alamiah semisal cacat, sakit, usia lanjut, bahkan bencana alam. Kondisi kemiskinan seperti ini menurut Kartasasmita (1996: 235 dalam Takdir, 2013) disebut sebagai "*Persisten Poverty*" yaitu kemiskinan akut dan turun temurun. Biasanya, kemiskinan ini dapat ditemui di daerah bencana, daerah terisolir, maupun daerah yang sulit dalam mengakses sumber daya alamnya.

Kemiskinan kultural berkaitan erat dengan gaya hidup, kebiasaan, atau budaya yang membuat seseorang merasa hidup berkecukupan. Kelompok masyarakat seperti ini, sulit diajak untuk berpartisipasi dalam pembangunan atau dalam usaha perbaikan taraf hidup karena dalam pandangan mereka, mereka telah hidup berkecukupan. Pendapat ini tentu akan berbanding terbalik jika diamati dengan kacamata pengukuran umum. Taraf hidup mereka akan terlihat rendah atau bahkan jauh tertinggal dari taraf hidup umum. Oscar Lewis dalam teori kebudayaan kemiskinan miliknya, memandang bahwa penyebab kemiskinan tidak

UNESA Universitas Negeri Surabaya

bisa didasarkan pada satu faktor penyebab saja. Faktor ekonomi yang selama ini dipandang sebagai faktor tunggal penyebab kemiskinan, nyatanya harus "berbagi ruang" karena Lewis melihat bahwa kemiskinan dapat terjadi karena "kebudayaan yang diturunkan". Dalam hal ini, Lewis menyebutnya sebagai kemiskinan kultural. Kemiskinan kultural terdiri dari nilai, sikap, dan pola kelakuan yang adaptif terhadap lingkungan hidup yang serba kekurangan sehingga menghasilkan fatalisme, kepasrahan, dan secara terus-menerus melakukan pengabaian atas nilai-nilai ideal (Sadewo, 2015: 252).

Sedangkan, kemiskinan struktural lebih disebabkan oleh faktor buatan manusia yang berwujud kebijakan ekonomi yang tidak adil, penyebaran aset produksi yang belum rata, KKN, serta tatanan ekonomi dunia yang hanya menguntungkan salah satu kelompok masyarakat (Baswir, 1997: 21 dalam takdir, 2013). Selanjutnya Sumodiningrat (1998: 27 dalam Takdir, 2013) menjelaskan bahwa kemiskinan struktural merupakan imbas dari upaya pemerintah untuk memerangi kemiskinan natural. Namun karena kebijakan yang dibuat belum tepat sasaran, sehingga mengakibatkan turunnya tingkat kesejahteraan masyarakat atau ketimpangan struktur masyarakat yang oleh Kartasasmita disebut sebagai "*accidental poverty*".

C. Kemiskinan dalam Perspektif Fenomenologi

Fenomenologi sebagai sebuah perspektif keilmuan berkembang atas jasa Alfred Schutz (Ritzer & Goodman 2004 dalam Siahaan 2011), di mana dalam penjelasannya Schutz memusatkan perhatian pada cara orang memahami kesadaran orang lain, sementara mereka hidup dalam aliran kesadaran mereka sendiri. Dalam perspektif fenomenologi, suatu realitas kemiskinan tidak dilihat secara objektif seperti ukuran-ukuran yang telah dijelaskan, tetapi justru dilihat secara subjektif. Dalam perspektif metode fenomenologi, kemiskinan adalah sebuah realitas sosial yang dialami sendiri oleh suatu rumah tangga miskin, dan oleh karena itulah rumah tangga mereka sendirilah yang akan lebih tepat untuk mendeskripsikannya. Fenomenologi dianggap tepat untuk membahas kemiskinan karena pada dasarnya setiap rumah tangga miskin memiliki pandangan hidupnya sendiri, memiliki motivasi, adat, latar belakang budaya, agama, dan ikatan primordial lainnya, sehingga hal ini merupakat sudut pandang yang unik dan berbeda di setiap kasus rumah tangga miskin.

Secara substansial, metode ini berfokus pada upaya pemahaman makna (*meaning*) secara subjektif terhadap tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam kesehariannya. Menurut Schutz, dalam memahami makna (*meaning*), seorang individu juga menggunakan perspektif intersubjektif untuk memahami dunia sosialnya (Siahaan, 2011: 225). Lebih lanjut lagi, Schutz menawarkan konsep motif. Ada dua pemaknaan dalam konsep motif. Yang pertama

UNESA Universitas Negeri Surabaya

adalah motif *in order to* dan yang kedua adalah motif *because of*. Motif *in order to* merupakan motif yang menjadi dasar seseorang melakukan sebuah hal. Bisa dikatakan, ini adalah tujuan seseorang ketika melakukan sesuatu. Sedangkan motif *because of*, merupakan motif yang berhubungan dengan alasan seseorang dalam melakukan sebuah hal (Poloma, 2000: 260).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Program BSPS di Desa Cangakan

Desa Cangakan merupakan desa dengan mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani dan buruh tani. Sayogyo (1977, dalam Susilowati, 2012: 20) mengelompokkan petani Jawa dalam 3 kategori yakni: petani skala kecil dengan penguasaan lahan usaha tani kurang dari 0,5 hektar, petani skala menengah dengan penguasaan lahan usaha tani antara 0,5 sampai 1 hektar, dan petani skala besar dengan penguasaan lahan usaha tani di atas 1 hektar. Susilowati juga menjelaskan bahwa data sensus pertanian yang dipublikasikan oleh BPS menunjukkan bahwa jumlah petani kecil meningkat dari 45,3 persen pada 1993 menjadi 56,4 persen pada 2003 dan ini menyebabkan petani Indonesia mayoritas didominasi oleh petani kecil. Lebih lanjut lagi, Singh (2002, dalam Elizabeth, 2007: 31) menjelaskan bahwa petani kecil dapat ditemukan melalui ciri-ciri: (1) memiliki keterbatasan pada penguasaan sumber daya, (2) ketergantungan hidup pada usaha tani, (3) tingkat pendidikan rendah, (4) secara ekonomi tergolong sebagai penduduk miskin. Elizabeth (2007) juga menuturkan bahwa sebagai masyarakat mayoritas yang hidup di pedesaan, petani tidak bisa dikategorikan sebagai masyarakat primitif, sekaligus juga tidak bisa dikategorikan sebagai masyarakat modern. Masyarakat petani berada di tengah-tengah antara suku bangsa primitif (*tribe*) dan masyarakat industri. Masyarakat petani yang ada di Desa Cangakan merupakan petani yang heterogen, artinya ada yang kaya, ada yang menengah, ada yang miskin, dan bersifat dinamis.

Menurut Data Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan Tahun 2016: Profil Desa dan Kelurahan Desa Cangakan Kecamatan Kareman Kabupaten Ngawi, dari total 758 kepala keluarga yang tercatat di dalamnya, ada 127 keluarga yang tergolong keluarga pra sejahtera, 208 keluarga yang tergolong keluarga sejahtera I, 302 keluarga yang tergolong keluarga sejahtera II, 104 keluarga yang tergolong keluarga sejahtera III, dan 17 keluarga yang tergolong keluarga sejahtera III plus.

Membincangkan kesejahteraan keluarga tidak pernah terlepas dari persoalan kemiskinan. Kemiskinan yang terdapat di Desa Cangakan bisa dikategorikan sebagai kemiskinan struktural yang merupakan buah dari ketidakmerataan pembangunan. Hal ini bisa dilihat dari akses jalan misalnya, pembangunan jalan menjadi jalan berpaving baru dilakukan di kisaran tahun 2016/2017. Pada perjalanan untuk menemui subjek misalnya, jalan menuju rumah

UNESA Universitas Negeri Surabaya

subjek sedang dalam tahap pemasangan paving yang baru sekitar 100 m, sedangkan sisanya masih berkilo-kilometer masih belum tersentuh paving dan masih merupakan tanah berlempung yang berwarna cokelat muda. Pembangunan paving didahului oleh pembangunan saluran air di tepi kanan dan kiri jalan. Bisa dilihat bahwa saluran air tersebut masih baru dibuat, dan jalan paving sedang dalam proses pemasangan di tahun 2016/2017. Itu berarti sebelum tahun 2016 jalanan desa cukup menyulitkan untuk akses keluar-masuk khususnya apabila datang musim penghujan. Selain itu, saat malam hari, Desa Cangakan tidak memiliki banyak lampu jalan, sehingga di beberapa sudut, kita harus menggunakan penerangan pribadi dari lampu motor saat melintas. Hal ini tentu saja merupakan hal yang perlu dipertimbangkan jika ingin Desa Cangakan menjadi desa yang memiliki pertumbuhan ekonomi. Keberadaan lampu jalan yang merata tentu saja akan sangat memudahkan alur keluar masuk barang dagangan dan jual beli.

Faktor struktural lain yang menjadi penyebab kemiskinan di desa ini adalah kurangnya perhatian pemerintah dalam hal pemberdayaan sumber daya manusia. Dengan segala potensi sumber daya manusia yang ada dan di dukung oleh sumber daya di bidang pertanian yang melimpah, pemerintah belum banyak memberikan dukungan berupa penyuluhan inovasi pertanian, penyuluhan budidaya tanaman, tidak ada balai latihan kerja, dan minimnya informasi terkait peningkatan keahlian warga.

Salah satu upaya pemerintah dalam hal pemerataan pembangunan yang terjadi di Desa Cangakan adalah melalui program BSPS yang diluncurkan oleh pemerintah. Mengacu pada pasal 1 Peraturan menteri PUPR No.13/PRT/M/2016. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) diartikan sebagai bantuan pemerintah berupa stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan keswadayaan dalam pembangunan/peningkatan kualitas rumah beserta sarana, prasarana, dan utilitas umum. Masyarakat berpenghasilan rendah atau disingkat MBR didefinisikan sebagai masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni. Rumah yang ditempati oleh MBR disebut dengan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) dan didefinisikan sebagai rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni. Peraturan menteri PUPR No.13/PRT/M/2016 tentang bantuan stimulan perumahan swadaya juga menyebutkan bahwa jenis kegiatan BSPS dapat digolongkan menjadi 3 jenis yakni:

1. Pembangunan Baru (PB)

PB merupakan akronim dari Pembangunan Baru. PB didefinisikan sebagai kegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni secara swadaya. Ada 2 jenis PB, yakni:

UNESA Universitas Negeri Surabaya

a. Pembangunan baru pengganti RTLH; atau

b. Pembangunan rumah baru

Pembangunan baru pengganti RTLH bisa dilakukan terhadap rumah dengan kerusakan seluruh komponen bangunan, baik komponen struktural (pondasi, tiang/kolom, balok, dan rangka atap) maupun komponen non struktural (dinding pengisi, kusen, penutup atap, dan lantai) dengan kondisi rusak total. Sedangkan pembangunan rumah baru di atas kavling tanah matang (tanah yang sudah mengalami penyelesaian permohonan hak kepemilikan, surat balik nama, dan sudah siap pakai untuk mendirikan bangunan).

2. Peningkatan Kualitas (PK)

Merupakan akronim dari Peningkatan Kualitas. PK didefinisikan sebagai kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni secara swadaya hingga rumah bisa menjadi layak huni. Kegiatan PK meliputi perbaikan RTLH dengan kondisi tidak memenuhi persyaratan (a) keselamatan bangunan, (b) kecukupan minimum luas bangunan, dan atau (c) kesehatan penghuni. Persyaratan keselamatan bangunan dapat dikategorisakikan ke dalam 3 hal, yakni: (1) rusak ringan dimana kerusakan terdapat pada komponen non struktural, (2) rusak sedang dimana kerusakan terdapat pada komponen non struktural dan satu komponen struktural, dan (3) rusak berat yang mana kerusakan terdapat pada sebagian besar bangunan, baik komponen struktural maupun komponen non struktural. Terkait persyaratan kecukupan minimum luas bangunan, harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dan untuk persyaratan kesehatan penghuni meliputi kecukupan sarana pencahayaan, sarana penghawaan, serta ketersediaan sarana mandi, cuci, dan kakus.

3. Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU)

Merupakan akronim dari Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum yang selanjutnya didefinisikan sebagai kelengkapan dasar fisik, fasilitas dan kelengkapan penunjang yang dibutuhkan agar perumaham dapat berfungsi secara sehat, aman, dan nyaman. Kegiatan PSU meliputi pembangunan jalan dan atau drainase lingkungan dengan syarat: (a) PSU belum tersedia atau kondisinya tidak layak, (b) tersedia tanah tidak dalam status sengketa yang bisa dibangun PSU, (3) adanya dukungan untuk upaj, peralatan kerja, dan tenaga pendamping yang bersumber dari APBD yang tercantum dalam usulan, serta (4) diusulkan oleh bupati/walikota atas permintaan kelompok penerima BSPS.

Berdasarkan penggolongan kegiatan BSPS di atas, jenis BSPS yang diterima warga Desa Cangakan adalah jenis bantuan PK yang mana program ini bertujuan untuk merenovasi rumah warga menjadi lebih layak huni. Warga tidak diharuskan untuk membangun ulang keseluruhan rumah, tetapi bantuan ini hanya mensyaratkan warga untuk membangun bagian depan rumah mereka sampai material bantuan yang diberikan oleh pemerintah habis.

Penerima BSPS di Desa Cangakan adalah warga yang diusulkan oleh RT dan Kepala Dusun setempat yang tentu saja memenuhi

UNESA Universitas Negeri Surabaya

kriteria calon penerima BSPS yakni: (1) WNI yang sudah berkeluarga, (2) Memiliki/menguasai tanah dengan syarat dikuasai secara fisik, memenuhi legalitas, tidak dalam sengketa, dan lokasi tanah sesuai tata ruang wilayah, (3) belum memiliki rumah/memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni, (4) belum pernah mendapat BSPS dari pemerintah, (5) berpenghasilan paling banyak upah minimum provinsi setempat, (6) diutamakan memiliki keswadayaan dan berencana membangun atau meningkatkan kualitas rumahnya, (7) bersedia membentuk kelompok dengan jumlah paling banyak 20 orang, dan (8) bersedia membuat pernyataan.

Peraturan menteri PUPR No.13/PRT/M/2016 juga menerangkan mekanisme penyaluran BSPS. Sebagaimana yang tertuang pada BAB V yang menjelaskan (1) penetapan lokasi dan (2) calon penerima BSPS. Penetapan lokasi BSPS dimulai dari pengusulan BSPS yang dilakukan oleh bupati/walikota dengan menyerahkan daftar desa/kelurahan kepada pemerintah provinsi. Kemudian, pemerintah provinsi melakukan verifikasi terhadap usulan bupati/walikota. Hasil verifikasi pemerintah provinsi berupa daftar prioritas lokasi BSPS kemudian diteruskan kepada pemerintah pusat. Lokasi BSPS ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan program prioritas pemerintah pusat (direktif presiden, program prioritas Kementerian PUPR, kegiatan berdasarkan usulan lembaga tinggi negara dan kementerian negara/lembaga, dan atau kegiatan berdasarkan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama). Kemudian, penetapan lokasi BSPS dilakukan oleh menteri bidang perumahan dan kawasan pemukiman.

Selanjutnya, terdapat Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK yang melakukan seleksi calon penerima BSPS. PPK merupakan pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk mengambil keputusan dan atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN di Kementerian PUPR. Dalam melaksanakan seleksi calon penerima BSPS, PPK dibantu oleh pemerintah kabupaten/kota, Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), dan atau pihak ketiga (perorangan/badan hukum yang ditetapkan oleh PPK untuk melaksanakan sebagian tugas dan tanggung jawab satuan kerja atau PPK.

Peraturan menteri PUPR No.13/PRT/M/2016 di atas juga menyebutkan bahwa ada 2 bentuk penyaluran program bantuan BSPS, yakni berupa uang atau berupa barang. BSPS dalam bentuk uang disalurkan kepada penerima BSPS guna membeli bahan bangunan dalam rangka kegiatan PB atau PK, serta juga dapat digunakan sebagai upah kerja dengan ketentuan bahwa penerima BSPS dalam bentuk uang merupakan WNI lanjut usia sekurang-kurangnya 58 tahun dan atau penyandang disabilitas, dan besaran yang diperbolehkan digunakan sebagai upah kerja

UNESA Universitas Negeri Surabaya

adalah maksimal 15 persen dari dana BSPS yang diterima. Penyaluan BSPS dalam bentuk uang dilakukan melalui bank/pos penyalur. Sedangkan BSPS dalam bentuk barang dapat disalurkan dalam bentuk: (a) bahan bangunan untuk rumah, (b) rumah, atau (c) bahan bangunan untuk PSU. Penyaluran BSPS dalam bentuk barang dilakukan oleh penyedia barang sesuai kontrak dengan PPK.

Kabupaten Ngawi mendapatkan bantuan BSPS untuk 374 RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) yang tersebar ke dalam 5 desa. Bantuan yang turun dari kabupaten adalah berupa uang yang kemudian di terima oleh pihak desa. Sesuai dari arahan dari pemerintah, pihak desa kemudian menggunakan uang bantuan tersebut untuk berbelanja material bangunan yang akan diberikan kepada masing-masing penerima bantuan. Desa Cangakan merupakan desa dengan jumlah penerima BSPS terbesar, yakni sebanyak 121 unit . Disusul oleh Desa Jatirejo (78 unit), Desa Karang Malang (77 unit), Desa Kiyonten (68 unit), dan Desa Kasreman (30 unit). Masing-masing RTLH mendapatkan bantuan senilai lima belas juta rupiah yang diberikan dalam bentuk material.

Program BSPS di Desa Cangakan diluncurkan dalam bentuk material bangunan saja. Itu berarti biaya tukang, dan biaya lain yang timbul selama pengerjaan tidak ditanggung oleh negara. Setiap penerima wajib memiliki kesanggupan untuk menyelesaikan pembangunan rumah sebelum tenggat waktu yang ditentukan. Bantuan material tahap 1 mulai diluncurkan pada 27 Maret 2017 dan bantuan tahap 2 diluncurkan pada 6 Mei 2017. Tanggal ini bisa dilihat di *fotocopy* daftar rencana pembelian bahan bangunan yang dimiliki oleh masing-masing penerima bantuan. Seluruh pembangunan harus sudah selesai sebelum Hari Raya Idul Fitri yang jatuh pada 25-26 Juni 2017.

Keharusan mengeluarkan biaya sendiri, memunculkan respon yang beragam di dalam masyarakat. Pada beberapa subjek, program BSPS bisa lebih cepat diterima karena subjek memiliki sumber daya yang bisa mendukung terselenggaranya pembangunan rumah. Subjek lain juga menerima BSPS karena memiliki tabungan yang sewaktu-waktu bisa diambil sehingga ia menggunakan tabungannya untuk pembangunan rumah. Sedangkan alasan subjek lain untuk menerima program bantuan ini adalah karena subjek memiliki suami yang memiliki keahlian membangun rumah, sehingga ia tidak memikirkan biaya untuk menyewa pekerja. Beberapa subjek lain yang mengaku kesulitan tetapi tetap menerima program ini mengaku meminjam uang kepada saudara dan bank adalah jalan satu-satunya untuk mendapatkan uang untuk membayar kuli dan menyelesaikan pembangunan. Dalam kasus lain, usaha subjek untuk menyediakan ongkos pembangunan rumah adalah dengan menjual kalung emas, dan bergotong royong. Selain itu, ada subjek lain yang menerima program ini sebab dibantu oleh anaknya.

Keseluruhan subjek dalam penelitian ini dipilih secara acak. Kendati respon yang mereka

UNESA Universitas Negeri Surabaya

tunjukkan beragam, tetapi keseluruhannya menyanggupi persyaratan penerimaan bantuan BSPS sehingga mereka bisa menyelesaikan pembangunan rumah mereka sampai material yang diberikan habis dan sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan. Selain itu, ada subjek lain yang sebenarnya juga diberi kesempatan untuk mendapatkan program bantuan ini, tetapi subjek mengundurkan diri karena benar-benar tidak memiliki biaya, sumberdaya, serta bertepatan dengan peringatan kematian suaminya sehingga uang yang dimiliki digunakan untuk biaya peringatan kematian suaminya.

B. Respon Warga terhadap BSPS

1. Menerima

Program BSPS merupakan angin segar bagi warga kurang mampu. Bantuan yang dijanjikan oleh pemerintah senilai 15 juta rupiah dalam bentuk material, tentu saja akan sangat berguna. Salah seorang subjek menjelaskan bahwa ia mengetahui program BSPS dari Pak RT dan Bapak Kepala Dusun. Lalu ia diminta untuk menghadiri rapat di balai desa guna mendapat penyuluhan terkait teknis pelaksanaan program BSPS. Subjek ini mengatakan bahwa penyuluhan dilakukan oleh petugas BSPS yang berasal dari luar desa, dengan tentu saja didampingi oleh aparat desa. Dari pemaparan yang diberikan, ia mengatahui bahwa program ini merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk membantu masyarakat menegah kebawah untuk memiliki rumah layak huni. Bantuan ini menyasar warga yang sudah diusulkan oleh pihak desa dengan memiliki kriteria seperti memiliki rumah yang lantainya masih tanah serta dinding masih kayu/bambu. Bantuan ini tentu saja disambut dengan suka cita olehnya, dan ia berharap program bantuan ini tetap diteruskan oleh pemerintah, dan jika bisa pemerintah juga menyediakan biaya pembangunan rumah.

Selanjutnya, subjek lain menuturkan bahwa ia mendapatkan informasi mengenai program BSPS dari RT dan kepala dusun, kemudian ia mengakudiberi pengarahan lebih lengkap mengenai program ini di balai desa oleh petugas khusus BSPS dan juga aparat desa. Subjek dan suaminya menganggap bahwa bantuan ini adalah kesempatan baginya untuk bisa memperbaiki kondisi rumahnya, sehingga ia dan suaminya memutuskan untuk menerima program bantuan ini. Beruntung, sang suami memiliki keahlian dalam membangun rumah, sehingga keseluruhan pengerjaan rumahnya dilakukan oleh suaminya. Subjek mengatakan bahwa program BSPS adalah program yang bagus dan layak untuk diteruskan, tetapi ia berharap agar pemerintah meluncurkan bantuan untuk pembangunan secara gratis (menyedakan material dan tukangnya) rumah-rumah lansia miskin yang sudah tidak memiliki tenaga untuk membangun, dan juga tidak mampu membayar tukang.

Pada dua kasus diatas, program BSPS dilaksanakan tanpa kendala berarti karena keduanya memiliki sumber daya untuk melakukan pembangunan rumahnya. Subjek memiliki tabungan yang sewaktu-waktu bisa

UNESA Universitas Negeri Surabaya

digunakan sebagai dana darurat, dan dalam hal ini tabungannya sangat membantu untuk menyukseskan program BSPS. Sedangkan subjek satunya juga dapat dikatakan menerima program BSPS tanpa kendala karena ia memiliki suami yang memiliki keahlian untuk membangun rumah. Itu berarti, ia bisa memangkas ongkos tukang karena rumahnya dibangun dengan tenaga mandiri.

Senada dengan penuturan dua subjek sebelumya, subjek ketiga ini mengetahui program bantuan dari kepala dusun yang menjelaskan secara sekilas bahwa pemerintah sedang mengadakan bantuan pembangunan rumah dan ia diminta untuk hadir ke balai desa untuk mendapatkan pemaparan lebih lanjut tentang program ini. Ia kemudian datang ke balai desa dan mendapatkan penjelasan program ini dari petugas BSPS yang berasal dari luar desa. Dari pemaparan itulah subjek mengetahui bahwa bantuan yang akan diterima oleh warga adalah bantuan berupa material bangunan sejumlah 15 juta rupiah yang akan dikirimkan secara bertahap. Subjek berpendapat bahwa program ini adalah jenis program yang mengharuskan calon penerimanya untuk memiliki kemampuan finansial atau kemampuan membangun rumah, juga karena semua bentuk bantuan yang diberikan hanyalah berupa material. Subjek lalu berpikir bahwa ia akan menyelesaikan pembangunan rumahnya dengan tenaga keluarganya sendiri (subjek, ayah, ibu, adik) dan menyewa tukang hanya untuk mengerjakan pekerjaan yang tidak bisa dia lakukan seperti membuat pondasi. Alhasil, ia memangkas cukup banyak biaya tukang karena mayoritas pembangunan rumah dikerjakan oleh keluarganya sendiri. Selain menggunakan material dari pemerintah, ia juga mengaku menambah material yang kurang seperti pintu dan beberapa material tambahan. Untuk membiayai itu, subjek mengatakan bahwa ia harus menjual kalung kesayangannya. Subjek berpendapat bahwa program bantuan seperti ini merupakan program yang cukup membantu di satu sisi, sekaligus program yang cukup memberatkan di sisi lain. Menurutnya, program bantuan ini hanya bisa diakses oleh warga yang siap dari sisi ekonomi/kemampuan, karena program bantuan ini menyerahkan pembangunan sepenuhnya kepada penerima bantuan. Kedepannya, ia berharap program seperti ini berajalan dengan beberapa inovasi, misalnya selain menyediakan material, pemerintah juga menyediakan pekerja bangunannya atau menyediakan uang untuk membiayai pekerja bangunannya.

Subjek selanjutnya mengetahui bantuan ini dari RT dan kepala dusun. Ia mendapatkan surat undangan yang memintanya untuk hadir mendengarkan penjelasan mengenai program bantuan terkait perumahan yang di lakukan di balai desa. Dari sana, ia mendapat penjelasan bahwa program ini adalah program bantuan berupa material bangunan dan mengharuskan penerimanya membiayai sendiri pembangunan rumahnya. Subjek mengatakan bahwa pihak desa sudah mengantongi daftar warga miskin

UNESA Universitas Negeri Surabaya

calon penerima bantuan dengan kriteria seperti rumahnya masih terbuat dari kayu dan berlantaikan tanah. Dalam pembangunan rumahnya, ia menggunakan uang pribadi dan uang hasil dari meminjam kepada saudaranya. Menurutnya, program BSPS ini sangat berguna untuk memberikan stimulus kepada warga untuk membangun rumahnya menjadi rumah layak huni. Ia berharap agar bantuan ini bisa diteruskan karena menurutnya program ini telah berhasil membantu warga untuk mendapatkan hunian yang lebih layak.

Senada dengan subjek sebelumnya, subjek selanjutnya ini juga membutuhkan bantuan pihak lain untuk membantu menyelesaikan pembangunan rumah miliknya. Ia mengaku pembangunan rumah ini dengan mengandalkan hutang dari bank. Dan untuk pembayaran cicilan kedepannya, subjek mengaku akan dibantu oleh anak dan cucunya. Ia mengetahui program bantuan ini dari kepala dusun dan program ini akan menyar warga yang rumahnya masih terbuat dari kayu/bambu. Kendati membutuhkan effort yang tidak mudah, ia merasa bantuan BSPS ini cukup membantu warga sehingga kedepannya masih diharapkan program bantuan serupa dari pemerintah. Menurutnya, pemerintah perlu meninjau kembali bantuan yang diberikan kepada warganya. Untuk penduduk berusia tua seperti dirinya misal, bantuan berupa material ini tentu saja membantu. Tetapi alangkah baiknya, jika penerima bantuan berusia tua, pemerintah turut memikirkan biaya tukang dan pembangunan rumahnya. Jika ingin lebih mudah, untuk penduduk berusia tua, pemerintah bisa meluncurkan bantuan berupa sembako. Sedangkan, untuk warga yang masih muda, pemerintah bisa meluncurkan berbagai macam bantuan, mulai dari pemberdayaan, pelatihan kerja, dan banyak lainnya.

Pada kasus beberapa subjek, berhutang adalah pilihan paling rasional untuk mendapatkan uang dengan cepat. Subjek berhutang kepada saudara untuk menutupi kekurangan pembiayaan pembangunan rumah, dan subjek lain memilih berhutang kepada bank untuk membiayai hampir keseluruhan pembangunan rumah. Berhutang merupakan pilihan terakhir yang bisa ditempuh pada saat seseorang sudah tidak memiliki sumber daya yang bisa mereka gunakan.

Hal lain dituturkan oleh subjek yang merasa keberatan untuk menyelesaikan program ini. Usianya yang sudah 70 tahun membuatnya merasa tidak mampu untuk menyelesaikan pembangunan. Ia tidak memiliki tenaga untuk membangun rumahnya sendiri, ia tidak memiliki harta benda yang bisa dijual, dan untuk berhutang ia juga tidak berani karena khawatir tidak sanggup membayar. Beruntung, ia memiliki anak perempuan yang membantunya untuk menanggung sebagian besar biaya pembangunan rumahnya. Atas bantuan dan pertimbangan yang diberikan oleh anaknya lah, ia sanggup menyelesaikan pembangunan rumahnya sampai akhir dengan biaya seadanya. Subjek mengetahui program ini dari kepala

UNESA Universitas Negeri Surabaya

dusun yang kemudian ia diminta hadir ke balai desa untuk mendapat pemaparan program, setelah ia setuju menerima program ini akan ada petugas yang datang dan melakukan survei kelayakan untuk mendapat bantuan. Subjek mengaku program BSPS adalah program baik dan layak diteruskan. Ia berharap pemerintah terus memberikan perhatian dan dukungan kepada masyarakat, khususnya masyarakat dengan kelas ekonomi menengah kebawah. Pembaharuan database keluarga miskin hendaknya tidak hanya bersumber dari data sensus lima tahunan. Pemerintah seyogyanya melakukan pendataan setiap enam bulan sekali sehingga pemerintah lebih bisa melihat perkembangan perekonomian warganya. Menurut Subjek, masih ada warga miskin baru yang belum terdata oleh pemerintah. Warga miskin baru ini bisa disebabkan oleh kematian kepala keluarga, kebangkrutan usaha, bahkan PHK di usia tua tanpa pesangon. Hal inilah yang memerlukan perhatian pemerintah supaya bantuan yang diberikan benar-benar menyasar kepada mereka yang membutuhkan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan, program BSPS dinilai sebagai program yang berhasil membantu masyarakat untuk memiliki rumah layak huni sehingga program ini tetap harus diteruskan untuk kedepannya. Tetapi tentunya, pemerintah diharapkan lebih memperhatikan pelaksaan program ini kasus per kasus. Karena tidak semua warga miskin memiliki sumber daya untuk melakukan pembangunan, sehingga pemerintah bisa memberikan opsi pembangunan gratis pada warga miskin yang berusia lanjut, atau tidak memiliki keluarga, dan kriteria lainnya yang bisa disesuaikan tergantung kondisi yang ada.

2. Menolak

Kendati program BSPS merupakan langkah pemerintah untuk memberikan hunian yang lebih layak bagi masyarakat, program ini dirasa belum sepenuhnya tepat untuk membantu kalangan warga miskin. Subjek lain mengatakan bahwa sebenarnya ia ditawari oleh RT dan kepala dusun sebagai salah satu penerima bantuan BSPS. Tetapi, ia mengatakan bahwa menolak program ini karena tidak sanggup apabila ia diharuskan untuk membangun rumah dengan uang pribadi. Bentuk penolakan yang subjek lakukan adalah dengan meminta maaf sekaligus menjelasan kondisinya pada saat RT datang dan menyampaikan bahwa ia akan menjadi salah satu penerima program BSPS. Hal ini disebabkan, karena kondisinya yang sudah berusia di atas 60 tahun dan juga baru saja ditinggal suaminya meninggal, yang menyebabkannya kesulitan untuk mendapatkan uang untuk biaya merenovasi rumah.

Kendati ia menolak untuk menerima BSPS tahun 2016, ia masih ingin di tahun mendatang masih diberikan kesempatan bantuan serupa, sebab menurutnya tahun 2016 bertepatan dengan peringatan kematian suaminya sehingga ia tidak bisa mengupayakan pembiayaan 2 hal secara bersamaan. Menurutnya, program bantuan BSPS ini merupakan program yang memiliki maksud baik, untuk memberikan

UNESA Universitas Negeri Surabaya

semangat kepada warga dalam hal memperbaiki rumah mereka masing-masing. Tetapi, program bantuan ini tidak cocok jika diberikan kepada warga dengan penghasilan rendah, karena mereka tidak memiliki uang lebih dan tabungan untuk biaya program ini. Program BSPS ini sangat direkomendasikan untuk diadakan kembali. Terlebih jika pemerintah turut menyediakan tukang atau menyediakan biaya untuk membayar tukang. Memiliki rumah layak huni merupakan harapan setiap orang karena termasuk kedalam kebutuhan dasar.

C. Motif Warga Desa Cangakan dalam Menerima BSPS

Di kehidupan sosial, sudah sering terdengar bahwasanya setiap tindakan yang dilakukan oleh invidu tidak pernah lepas dari motif. Hal ini sejalan dengan fenomenologi Alfred Schutz yang mencoba menganalisis tindakan manusia menjadi dua bagian, yakni *because of motive* dan *in order to motive.*

1. *Because of Motive*

Because of motive diartikan sebagai tindakan individu yang merujuk pada masa lalu. Penelitian ini menemukan dua motif sebaba dalam menerima program BSPS, yaitu:

a. Kondisi ekonomi tidak mampu

Motif yang satu ini merupakan motif yang memiliki dua sisi layaknya koin. Motif ini adalah motif yang dapat digunakan sebagai alasan untuk menerima bantuan, sekaligus juga dapat digunakan sebagai alasan untuk menolak bantuan. Pada beberapa kasus yang mana subjek memilih untuk menerima program BSPS, motif ketidakmampuan ekonomi justru digunakan sebagai alasan untuk menerima. Bagi mereka, bantuan berupa material bangunan dari pemerintah ini sebaiknya diterima saja karena mereka masih memiliki sumber daya yang dapat digunakan untuk membantu kelangsungan pembangunan rumah mereka.Sumber daya dalam konteks ini mengacu pada keberadaan harta benda yang bisa dijual, tabungan, gaji/ penghasilan, anak, keluarga, usia muda, kemampuan menukang (membangun rumah), serta kemampuan melakukan pinjaman sekaligus pelunasannya.

Bagi subjek yang memutuskan untuk menerima bantuan ini, keberadaan BSPS sangat berguna, karena tanpa bantuan pemerintah, subjek tidak bisa dengan segera memiliki rumah layak, karena dengan kondisi ekonomi yang dialami subjek, maka renovasi rumah bukanlah prioritas utama dan bisa jadi renovasi rumah hanya akan menjadi sebatas angan dan cita-cita. Keberadaan program ini tentu saja memunculkan motivasi subjek untuk melakukan perbaikan kondisi rumah. Selain itu, jika dibandingkan dengan apabila subjek melakukan pembangunan mandiri, maka pengeluaran yang harus luaran bisa lebih banyak karena mereka harus membeli material sekaligus membayar ongkos tukang.

Berbeda dengan subjek yang menerima program bantuan ini, bagi subjek lain yang menolak program ini, kondisi ekonomi yang tidak mampu merupakan alasan yang membuatnya tidak bisa menerima program ini.

UNESA Universitas Negeri Surabaya

Subjek yang merupakan seorang janda berusia 60 tahun tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk membantunya menyukseskan program bedah rumah. Ia sudah berusia tua dan sulit mendapatkan pekerjaan untuk membiayai pembangunan, ia tidak memiliki suami yang bisa diajak bekerja sama membangun rumah, anaknya tidak bisa membantu karena keterbatasan ekonomi juga, ia tidak memiliki tabungan, tidak memiliki harta benda yang bisa dijual, serta tidak bisa berhutang kepada saudara dan bank karena tidak memiliki kesanggupan untuk melunasi hutangnya.

b. Memiliki keahlian menukang

Motif yang menjadi alasan selanjutnya untuk subjek menerima program bantuan ini adalah karena subjek memiliki kemampuan menukang atau memiliki anggota keluarga yang memiliki keahlian ini. Keahlian menukang merupakan keahlian yang sangat berguna dalam mensukseskan program ini. Kemampuan ini sangat berguna untuk menekan biaya yang harus digunakan selama pembangunan berlangsung. Subjek yang memiliki suami yang memiliki keahlian menukang tentu saja sangat terbantu dengan keahlian suaminya ini, karena biaya yang dikeluarkannya dapat dialihkan untuk melengkapi material bangunan yang kurang.

Hal senada dituturkan oleh subjek lain yang juga memiliki keluarga yang memiliki keahlian untuk menukang. Kendati ia tetap menyewa tukang, tetapi mayoritas pembangunan rumahnya dikerjakan ia dan keluarganya. Keberadaan tukang yang ia sewa hanya digunakan untuk membantu pembangunan pondasi rumah. Sedangkan untuk pembangunan dinding, pemasangan genting, plester rumah, Subjek mengaku hal itu dilakukan oleh ayahnya, bersama dia, ibu, dan adiknya. Ia mengatakan bahwa kendati tukang yang ia sewa tidak bekerja secara penuh sampai pembangunan selesai, nyatanya biaya yang ia keluarkan untuk membayar tukang juga terbilang tidak sedikit. Dua puluh hari lamanya ia menyewa tukang dan biaya untuk membayar tukang adalah 70 ribu rupiah per hari dan belum termasuk makan 3 kali dan juga rokok. Baginya, uang tersebut tidaklah sedikit dan uang hasil jual kalungnya sudah ia gunakan untuk membeli material yang kurang. Sehingga, subjek memutuskan untuk membayar tukangnya dengan sistem *utang bahu* yang mana menurutnya, *utang bahu* berarti ia akan membayar gaji tukang setelah musim panen.

2. *In Order to Motive*

In order to motive diartikan sebagai motif yang merujuk pada tindakan yang terjadi di masa mendatang. Hal ini sangat erat kaitannya dengan tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh tiap individu. Penelitian ini menemukan 5 motif tujuan rumah tangga miskin menerima program BSPS, yaitu:

a. Memiliki tempat yang nyaman untuk berjualan

Motif ini dapat ditemukan pada beberapa subjek. Ada subjek yang menyatakan bahwa ia akan membuka warung dengan menjual rujak petis di depan rumanya. Dan kondisi rumah

UNESA Universitas Negeri Surabaya

sebelumnya yang terbuat dari papan dan bambu agaknya kurang nyaman untuk pembeli. Dengan adanya program bantuan ini ia bisa membuka tempat berjualan yang memadai. Warung ini nantinya bisa dikelola oleh dirinya dan anak perempuannya. Saat ini, sang anak perempuan sedang bekerja di warung milik orang lain, sehingga setelah rumah ini selesai di bangun, sang anak bisa menjalankan usaha warungnya sendiri di rumah.

b. Memiliki rumah layak huni

Rumah layak huni yang menjadi tujuan program ini didefinisikan sebagai rumah yang telah memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni. Keselamatan bangunan ini dilihat dari seberapa parah kerusakan sebuah rumah. Semakin banyak kerusakan, serta semakin vital bagian yang rusak, maka sebuah rumah belum termasuk dalam kategori layak huni. Kecukupan minimum luas bangunan sebagaimana yang diatur oleh undang-undang adalah kurang lebih 36 meter persegi per rumah, serta kesehatan penghuni dalam hal ini dilihat dari aspek sanitasi, serta kemudahan dalam mengakses kegiatan mandi, cuci, kakus (MCK). Motif memiliki rumah layak huni ini dapat ditemukan dalam wawancara yang dilakukan kepada seluruh subjek. Sebab, menurut mereka keberadaan rumah ini sangat berpengaruh dalam kehidupan keseharian, sehingga kebutuhan akan rumah layak huni menjadi kebutuhan yang perlu mendapat perhatian serius.

c.. Terhindar dari banjir

Rahayu (2009, dalam Aditia, 2017:12) mendefinisikan banjir sebagai peristiwa tergenangnya suatu tempat akibat meluapnya air yang melebihi kapasitas pembuangan air di sebuah wilayah yang dapat menyebabkan kerugian fisik, sosial, ekonomi. Dalam penelitian ini, ada seorang subjek yang rumahnya langganan banjir. Banjir bukan hanya terjadi akibat hujan, atau kesalahan dalam irigasi. Banjir disini terjadi akibat ketidakmampuan keluarga subjek untuk memiliki bangunan yang pondasinya sejajar dengan jalan raya. Sehingga, air hujan yang ada di jalan raya, bisa turun masuk ke halaman rumahnya. Beruntung, halaman rumahnya merupakan hamparan tanah yang ditumbuhi sedikit rumput, sehingga air tidak sampai masuk ke dalam rumah dan tertahan di luar. Tetapi tentu saja, kondisi ini akan sangat menyulitkan ketika musim penghujan tiba karena itu berarti membuat halaman rumah subjek menjadi becek, licin, dan terdapat genangan yang tidak sedikit.

Banjir dalam konteks pemahaman subjek ini diartikan secara sederhana sebagai genangan yang bisa ditemukan di hampir setiap sudut halaman rumahnya saat musim penghujan sebagai akibat dari letak rumahnya yang lebih rendah dari jalan raya depan rumahnya. Dan program BSPS ini merupakan angin segar baginya untuk membuat rumahnya memiliki pondasi yang bisa sejajar dengan jalan raya, sehingga ia berharap kedepannya rumahnya

UNESA Universitas Negeri Surabaya

tidak mendapatkan genangan air limpahan dari jalan raya lagi.

d. Terhindar dari kebakaran

Kebakaran merupakan nyala api yang berada di luar kendali manusia. Kebakaran memiliki sifat merusak dan menyebabkan banyak kerugian baik dari segi material, sampai non-material (seperti dapat menyebabkan cacat fisik, dan gangguan kejiwaan). Sebagai manusia yang tinggal di desa, salah seorang subjek mengaku menggunakan sistem pembakaran untuk menghilangkan limbah rumah tangga yang dihasilkannya. Pembakaran sampah ia lakukan rutin, di halaman belakang rumahnya. Kendati selama ini belum pernah ada kasus kebakaran di rumahnya, ia mengaku bahwa manusia tidak bisa memprediksi kapan musibah itu datang. Dan menurutnya, memiliki rumah yang terbuat dari tembok terasa lebih aman (lebih lambat saat api menjalar) dibandingkan jika rumahnya terbuat dari papan kayu atau bambu. Sehingga program bantuan BSPS yang memberikan bantuan berupa material bangunan ini dirasa akan sangat membantu mewujudkan rumahnya untuk menjadi rumah yang lebih aman dari kebakaran.

e. Berharap ada bantuan lain yang lebih sesuai

Tidak semua warga miskin yang terdata sebagai calon penerima bantuan, sanggup untuk mensukseskan program ini. Pada kasus subjek yang menolak, dapat diamati bahwasanya ia tidak dapat merasakan bantuan ini dikarenakan ia tidak memiliki sumber daya untuk memenuhi persyaratan dalam penyelesaian program, utamanya dalam hal jasa tukang. Subjek yang merupakan janda berusia di atas 60 tahun yang tentu saja tidak memiliki tenaga untuk membangun rumahnya secara mandiri, juga tidak memiliki harta benda untuk dijual, enggan berhutang karena akan menemukan kesulitan saat pembayaran, enggan menyulitkan anak, serta sudah tidak bisa bekerja maksimal sehingga tidak bisa mendapatkan uang untuk membiayai hal di luar kebutuhan kesehariannya.

Subjek merasa bahwa program BSPS adalah program yang baik, dan akan lebih baik jika pemerintah bisa menyediakan tenaga/ orang yang ditugaskan untuk membangun rumah penerima bantuan, khususnya bagi penerima bantuan yang benar-benar berada di bawah garis kemiskinan atau sudah tidak memiliki sumber daya yang bisa digunakan.

D. Strategi Rumah Tangga Miskin dalam Menyelesaikan Program BSPS

Terdapat 5 strategi yang digunakan subjek dalam menyelesaikan pembanguan rumah mereka dengan BSPS di Desa Cangakan, yakni: (1) membangun dengan tenaga sendiri, (2) menggunakan tabungan, (3) meminjam uang kepada saudara, (4) meminjam uang pada bank, dan (5) menjual kalung. Strategi tersebut dapat dianalisis menggunakan teori etika subsistensi yang dikemukakan oleh James Scott (1989. dalam Chiari, 2016: 6) dimana teori ini menjelaskan strategi bertahan hidup petani dalam memenuhi kebutuhannnya diupayakan kedalam 3 hal yakni:

UNESA Universitas Negeri Surabaya

1. Strategi mengikat sabuk lebih kencang

Konsep ini memiliki arti bahwasanya dalam bertahan hidup, seseorang harus melakukan penghematan dan mengatur pengeluaran mereka. Strategi ini dapat dilihat pada saat subjek harus menjual kalung kesayangannya guna mendapatkan uang untuk membayar biaya material rumah yang kurang. Dalam hal ini, subjek sudah tidak memiliki perhiasan yang bisa digunakan untuk mempercantik dirinya, dan ia harus kembali bekerja/menabung guna membeli kalung di kemudian hari.

Selanjutnya, strategi ini juga dapat ditemukan dalam wawancara dengan subjek lain yang menggunakan tabungan pribadinya untuk membiayai pembangunan rumahnya. Seandainya pemerintah tidak meluncurkan program bantuan ini, maka tabungan subjek akan digunakan untuk kepentingan lain. Karena tabungan subjek sudah habis digunakan untuk biaya pembangunan rumah, maka keperluan lain yang sebetulnya harus dibiayai oleh tabungan itu menjadi tertunda dan itu berarti, ia harus menabung dari awal untuk bisa digunakan membiayai kepentingan lain yang tertunda itu.

2. Strategi alternatif subsistensi

Konsep ini dapat diartikan sebagai cara lain untuk memperoleh penghasilan tambahan yang mana melibatkan bantuan keluarga. Strategi ini dapat ditemukan dalam wawancara bersama beberapa subjek. Strategi ini dapat dilihat manakala subjek melakukan strategi membangun dengan tenaga sendiri. Tenaga sendiri dalam hal ini berarti tenaga subjek dan keluarga. Subjek membangun sebagian besar rumahnya dengan tenaganya sendiri, serta tenaga ayahnya, ibu, dan adiknya. Menurutnya, hal ini sangat sukses dalam memangkas biaya tukang sebab ia hanya mengeluarkan ongkos tukang pada saat membangun bagian pondasi yang mana bagian itu memerlukan tenaga tukang. Hal senada dituturkan oleh subjek berinisial lainyang keseluruhan rumahnya dibangun oleh suaminya yang memiliki kemampuan untuk membangun rumah, sehingga ia mengaku tidak mengeluarkan biaya sewa tukang.

3. Strategi jaringan

Konsep ini memerlukan kemampuan untuk berinteraksi secara baik dengan orang lain seperti teman, tetangga, rekan kerja, saudara, maupun lembaga di luar keluarga. Strategi jaringan dapat dilihat dari wawancara yang dilakukan kepada beberapa subjek. Dalam hal ini, ada subjek yang meminjam uang kepada keluarganya untuk membiayai pembangunan rumah. Karena ia meminjam kepada saudaranya, maka jumlah uang yang bisa dipinjamkan kepadanya tentu sangat bergantung pada kondisi finansial keluarganya, sehingga bisa dipastikan dana pinjaman yang diterimanya berjumlah sangat terbatas. Dan untuk subjek lain, ia menggunakan dana pinjaman dari bank untuk menyelesaikan pembangunan rumahnya. Dan untuk pelunasan hutangnya ke bank, Ia mengaku akan dibantu oleh anak dan cucunya untuk membayar angsurannya.

UNESA Universitas Negeri Surabaya

Berikut ini adalah bagan yang berisi tanggapan, motif, dan strategi warga Desa Cangakan terkait BSPS:

Bagan 1.1 Tanggapan, Motif, dan Strategi Warga Desa Cangakan Terhadap BSPS

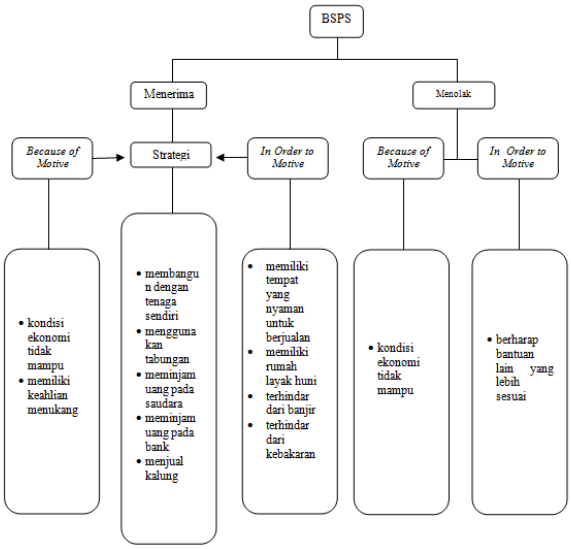

Sumber: Data primer

SIMPULAN

Kemiskinan merupakan permasalahan yang sangat kompleks sehingga pemerintah selalu memberi perhatian besar pada masalah ini. Salah satu dari tiga kebutuha primer manusia adalah kebutuhan akan terpenuhinya rumah tinggal, dan tingkat keterpenuhan rumah layak huni di Indonesia untuk rakyat miskin terbilang masih rendah. Pemerintah melalui Kementerian Perumahan Rakyat menggulirkan program bantuan yang diberi nama Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Karena bantuan ini bersifat "stimulan", maka penerima bantuan diperbolehkan untuk menambah secara pribadi material sudah diberikan sehingga bisa mendapatkan hunian dengan kualitas yang lebih baik.

Salah satu daerah yang mendapatkan progam bantuan ini adalah Kabupaten Ngawi. Dibandingkan dengan kabupaten – kabupaten di sekitarnya, kabupaten Ngawi memiliki persentase kemiskinan sebesar 10,48%. (Badan Pusat Statistik, 2017: 16). Kabupaten Ngawi mendapatkan bantuan bagi peningkatan Rumah Tidak Layak Huni sejumlah 374 unit yang tersebar pada 5 desa yakni Desa Jatirejo (78 unit), Desa Cangakan (121 unit), Desa Karangmalang (77 unit), Desa Kasreman (30 unit), dan Desa kiyonten (68 unit) (Direktorat Jenderal Penyedia Perumahan: 2017). Desa yang mendapatkan program BSPS terbanyak adalah Desa Cangakan. Desa Cangakan termasuk dalam wilayah administasi Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi. Ada 121 rumah tangga miskin di desa ini yang mendapatkan progam BSPS. Hal ini sejalan dengan situasi di lapangan yang mana di desa ini masih ditemukan rumah – rumah warga yang terbuat dari papan kayu, triplek, dan juga anyaman bambu.

Program BSPS tidak hanya menuai penerimaan, tetapi juga penolakan. Motif warga yang menerima program bantuan ini dibagi menjadi dua, yakni motif sebab (*because of motive*) dan motif akibat (*in order to motive).* Motif sebab yang ditemukan antara lain: kondisi ekonomi tidak mampu dan memiliki keahlian menukang. Sedangkan motif akibat yang ditemukan antara lain: ingin memiliki tempat

UNESA Universitas Negeri Surabaya

yang nyaman untuk berjualan, memiliki rumah layak huni, terhindar dari banjir, serta terhindar dari kebakaran. Sedangkan, warga yang menolak program ini juga memiliki 2 motif. Motif sebab yang menjadi alasan penolakan adalah ketidakmampuan ekonomi. Dan motif akibat yang menjadi alasan penolakan adalah menunggu bantuan lain yang lebih sesuai.

Bagi warga yanga menerima program bantuan ini, strategi yang digunakan dalam pemenuhan program ini adalah: membangun dengan tenaga sendiri, menggunakan tabungan, meminjam uang kepada bank, dan menjual kalung.

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, Rahardjo. 2016. *Membangun Desa Partisipatif.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Aditia, Vitra. 2017. Skripsi. *Bencana Banjir dan Penangannanya Menurut Masyarakat Bantaran Sungai Bengawan Solo di Tanggulrejo, Kecamatan Babat*. Surabaya: Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Jurusan Pendidikan Geografi, Universitas Negeri Surabaya.

Alfian. 1980. *Kemiskinan Struktural: Suatu Bunga Rampai*. Jakarta: Yayasan Ilmu-ilmu Sosial.

Amado,Miguel P. dkk. 2017. *Inclusive housing program:The case of Oé-Cusseregion in East Timor.* https://www.scipedia.com/public/Amado_et_al_2017a.Diakses pada 22 November 2017 pukul 09.06 WIB.

Badan Pusat Statistik. 2017. *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten Kota Tahun 2017.* https://www.bps.go.id/publication/2018/04/06/69f8e023485fcd4893164bbf/data-dan-informasi-kemiskinan-kabupaten-kota-tahun-2017. Diakses pada 28 Maret 2018 pukul 12.15 WIB.

Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan. 2017. *374 UNIT RTLH DI NGAWI SIAP DIPERBAIKI.* http://perumahan.pu.go.id/ditpnp/berita/show/191. Diakses pada 12 Desember 2018 pukul 11.48 WIB.

Elizabeth, Roosganda. 2007. *Fenomena Sosiologis Metamorphosis Petani: ke Arah Keberpihakan oada Masyarakat Petani di Pedesaan yang Terpinggirkan Terkait Konsep Ekonomi Kerakyatan.* Bogor: Forum Penelitian Agro Ekonomi. Vol. 25 No. 1:29-42.

Emzir. 2012. *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Rajawali Pers.

Fajriah, Lily Rusna. 2018. *IMF Puji RI Berhasil Turunkan Angka Kemiskinan hingga 40%.* https://ekbis.sindonews.com/read/1285448/34/imf-puji-ri-berhasil-turunkan-angka-kemiskinan-hingga-40-1519709547. Diakses pada 25 Maret 2018 pukul 14.35 WIB.

Isabella, dkk. 2017. *EVALUASI PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (DESA REJO MULYO*

UNESA Universitas Negeri Surabaya

KECAMATAN WAY SERDANG KABUPATEN MESUJI TAHUN 2014). https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiYrP-jitHXAhVCs48KHelGBToQFgguMAE&url=http%3A%2F%2Fejournal.uigm.ac.id%2Findex.php%2FPDP%2Farticle%2Fdownload%2F195%2F199&usg=AOvVaw2Wt1dW-imz4ygSgdpwc66D. Diakses pada 22 November 2017 pukul 09.06 WIB.

Kadji, Yulianto. 2013. *Kemiskinan dan Konsep Teoritisnya.* https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwis0q-t9IbaAhVEpY8KHcMrBdAQFggyMAE&url=http%3A%2F%2Frepository.ung.ac.id%2Fget%2Fsimlit_res%2F1%2F318%2FKemiskinan-dan-Konsep-Teoritisnya.pdf&usg=AOvVaw0Iau2GMoFJdmkTQ6GT-MgT. Diakses pada 25 Maret 2018 pukul 14.10 WIB.

Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi).* Bandung: Remaja Rosdakarya.

Peraturan Menteri PUPR No.13/PRT/M/2016. http://jdih.pu.go.id/peraturan-download.html?id=2221. Diakses pada 24 Maret 2020 pukul 12.25 WIB.

Pramita, Asta Lugra, dkk. 2015. *PERANAN DANA BANTUAN SOSIAL TERHADAP KUALITAS RUMAH MASYARAKAT MISKIN MELALUI PROGRAM BEDAH RUMAH DI KABUPATEN BULELENG*. https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiYrP-jitHXAhVCs48KHelGBToQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fojs.unud.ac.id%2Findex.php%2FEEB%2Farticle%2Fdownload%2F11347%2F9086&usg=AOvVaw1Uq5tDHwxoJ1jrJUzN3F8_ . Diakses pada 22 November 17 pukul 09.03 WIB..

Poloma, Margaret M. 2000. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Press.

Sadewo, FX Sri, dkk. 2015. *Masalah – Masalah Kemiskinan di Surabaya (edisi revisi).* Surabaya: UNESA University Press.

Siahaan, Hotman. 2011. *Profil Kemiskinan di Surabaya: Sebuah Analisis Fenomenologis.* Universitas Airlangga: Jurnal Tahun 2011 Vol 24. No 3. Online. https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj306zglbrQAhVBMI8KHUZ5BtQQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fweb.unair.ac.id%2Fadmin%2Ffile%2Ff_19997_jr12.pdf&usg=AFQjCNG3FaXhp7cph-1SXztR1E8scuj2VQ&sig2=S7iMqzDDTdkxtJgN6sXN0Q&bvm=bv.139250283,d.c2I. Diakses pada 9 Juni 2017 pukul 21.17 WIB.

Surat Keputusan Menteri PUPR No. 28/KPTS/M/2017.https://www.scribd.com/presentation/345410653/Kebijakan-BSPS. Diakses pada 24 Maret 2018 pukul 12.25 WIB.

UNESA Universitas Negeri Surabaya

Susilowati, Nenggih. 2016. Hubungan Aspek Mata Pencaharian dengan Struktur Sosial Suku Akit di Pulau Rupat, Riau dalam Teori Ekologi Budaya. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://sosiologi.fis.unp.ac.id/images/download/BAHAN/ANTROPOLOGI%2520EKOLOGI.pdf&ved=2ahUKEwjE-9vPp5DrAhXWc30KHXsFA_sQFjAAegQICRAB&usg=AOvVaw1SvOhJ-hVaYhWqPdSLt9_v. Diakses pada 10 Agustus 2020 pukul 19.40 WIB.

Susilowati, Sri Hery dan Mohamad Maulana. 2012. *Luas Lahan Usaha Tani dan Kesejahteraan Petani: Eksistensi Petani Gurem dan Urgensi Kebijakan Reforma Agraria.* https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://media.neliti.com/media/publications/53965-ID-luas-lahan-usaha-tani-dan-kesejateraan-p.pdf&ved=2ahUKEwiorIWC1ZDrAhW7ILcAHSEWDHQQFjAAegQIBBAB&usg=AOvVaw3pXN_Sw0dTFLUgFmUNZtMS. Diakses pada 10 Agustus 2020 pukul. 20.05 WIB.

Takdir, Arif, dkk. 2013. *Analisis Kemiskinan Rumah Tangga Berdasarkan Karakteristik Sosial Ekonomi di Kabupaten Aceh Barat Daya. Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Vol. 1, No. 4. Online.* https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjO3-2YmrrQAhXFOI8KHRbNAhgQFggrMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.jurnal.unsyiah.ac.id%2FMIE%2Farticle%2Fdownload%2F4545%2F3919&usg=AFQjCNH9N98F--8OaEUdkwpcBT5T03lpBA&sig2=Lby8rpnCB44IOarUaKAANA&bvm=bv.139250283,d.c2I. Diakses pada 6 Juni 2017 pukul 23.10 WIB.

Sumber lain:

Data Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan Tahun 2016: Profil Desa dan Kelurahan Desa Cangakan Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi (Pemberian Kaur Pembangunan saat observasi awal).

Potensi Desa dan Kelurahan Tahun 2016: Profil Desa dan Kelurahan Desa Cangakan Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi (Pemberian Kaur Pembangunan saat observasi awal).

UNESA Universitas Negeri Surabaya